



Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Yusranda Saputra

Universitas Mitra Indonesia

Korespondensi penulis: yusrandasaputra672@gmail.com

Meita Sekar Sari

Universitas Mitra Indonesia

E-mail: meita@umitra.ac.id

Darwin Warisi

Universitas Mitra Indonesia

E-mail: darwinwarisi@gmail.com

Universitas Mitra Indonesia, Jl. Z.A. Pagar Alam No. 7 Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung 35145

Abstract. *This research aims to determine the influence of Transparency and Competence of Village Officials on Accountability in Village Fund Management (study at the Village Government of Natar District, South Lampung Regency). The method used in this research is quantitative descriptive where the data processing is carried out statistically and then the data used is primary data in the form of a questionnaire. The population in this study were village officials in 26 villages in Natar District, South Lampung Regency and the sampling technique used a saturated sampling method with a total sample of 130 village officials consisting of village heads, village secretaries, general and administrative heads, financial heads and planning department. The analysis technique is carried out through validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression testing and hypothesis testing. Based on the results of the analysis, it can be concluded that simultaneously Transparency and Village Apparatus Competence have a positive and significant effect on Village Fund Management Accountability and partially each variable has a positive and significant effect on Village Fund Management Accountability.*

Keywords: *Transparency, Village Apparatus Competence, Accountability for Village Fund Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dimana pengolahan datanya dilakukan secara statistik kemudian data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa pada 26 desa di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 130 aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur umum dan tata usaha, kaur keuangan dan kaur perencanaan. Teknik analisis yang dilakukan melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan secara parsial masing-masing variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata kunci: Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

LATAR BELAKANG

Di era milenial ini perhatian terhadap desa di Indonesia semakin meningkat, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan yaitu dengan mengalokasikan dana desa yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa akan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dalam bentuk dana desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang yang diberikan kepercayaan (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyediakan dan melaporkan seluruh kegiatan kepada pihak yang memberikan kepercayaan tersebut (Riski & Maryono, 2022). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tata kelola sumber daya dan penerapan peraturan yang ditugaskan pada kepentingan pelapor untuk memperoleh target yang telah ditentukan. Jadi, pada dasarnya akuntabilitas sangat diperlukan dalam ruang lingkup pemerintahan desa karena sebagai penunjang penerapan otonomi desa supaya seluruh kegiatannya dapat berjalan dengan baik.

Dalam penyusunan akuntabilitas pengelolaan dana desa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, transparansi dan kompetensi aparatur desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan agar aparatur desa dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat untuk mengelola dana desa secara transparan (Fajri & Julita, 2021). Transparansi merupakan sikap terbuka dari pemerintah untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan pihak yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Aprilya & Fitria, 2020). Untuk menciptakan sikap transparansi maka setiap tahapan proses pemerintahan, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya. Selain itu, informasi harus relevan sehingga orang dapat memahaminya.

Kompetensi aparatur desa adalah karakter dan sifat yang menjadi fondasi bagi individu supaya mencapai hasil kerja yang efektif, mencakup kemampuan, wawasan dan sikap yang tercermin dalam pelaksanaan tugas mereka untuk mengelola dana desa (Fajri & Julita, 2021).

Kompetensi yang baik dari aparatur desa tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik, sehingga pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan baik.

Dana desa merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota diseluruh negeri untuk memfasilitasi swakelola pembangunan desa yang efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK/2023, penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dalam II tahapan, yaitu : Tahap I (60%) penyaluran dana dilakukan paling lambat pada bulan Juni dan Tahap II (40%) penyaluran dana dilakukan paling cepat pada bulan April.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2024

Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan gambar tentang perkembangan dana desa, diketahui pada tahun 2015 dana desa yang terserap mencapai angka 82,72% dari total anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp.20,7 triliun. Selanjutnya pada tahun 2016 dana desa yang terserap mencapai angka 97,65% hal ini sejalan dengan penyaluran dan anggaran dana desa yang terus bertambah secara signifikan, dengan total anggaran mencapai Rp.47 triliun, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 total anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah mengalami kesamaan angka yaitu sebesar Rp.60 triliun. Pada tahun 2019 dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.70 triliun, selanjutnya pada tahun 2020 dana desa yang terserap mencapai angka 99,95% dengan jumlah anggaran mencapai Rp.71,2 triliun, selanjutnya pada tahun 2021 dana desa yang direalisasikan

oleh pemerintah mengalami peningkatan dengan jumlah anggaran mencapai Rp.72 triliun. Pada tahun 2022 dana desa yang direalisasikan oleh pemerintah mengalami penurunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4 triliun dari tahun sebelumnya menjadi Rp.68 triliun, adanya penurunan anggaran dana desa tersebut dikarenakan akan difokuskan untuk program Bantuan Tunai Langsung (BLT) dengan tujuan untuk mengurangi dampak pasca pandemi covid-19 dan penanganan kemiskinan yang ada di desa, anggaran dana desa tersebut akan dibagikan untuk 74 ribu desa diseluruh Indonesia dengan memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebanyak 40% dari total anggaran dana desa dan setiap keluarga yang termasuk dalam kategori kurang mampu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp.300.000 per bulan sedangkan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat seperti, program ketahanan pangan dan pembangunan desa (Sumber : Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar). Kemudian pada tahun 2023 dana desa kembali mengalami peningkatan dengan jumlah anggaran mencapai Rp.70 triliun.

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Dalam Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 857.6 triliun, dari angka Transfer ke Daerah (TKD) salah satunya ialah transfer dana desa yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf (f) sebanyak Rp.71 triliun, dari besaran dana desa tahun 2024 tersebut akan dibagikan secara merata kepada 75.259 desa di 343 kabupaten/kota dari 75.265 desa sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100/145/2022, dengan minus 6 desa tidak mendapatkan alokasi dana desa sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Lembaga (K/L).

Kecamatan Natar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dan secara administratif luas wilayahnya mencapai 700,32 km². Pada pemerintah Kecamatan Natar ini terdapat 26 desa dan jumlah penduduknya mencapai 19.046 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 9.775 jiwa sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 9.360 jiwa. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan dana desa yaitu suatu keputusan dari lembaga berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, kebijakan yang mengatur dana desa ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana desa akan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di area, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Prioritas dari pembangunan terletak pada pembangunan desa sedangkan prioritas dari pemberdayaan masyarakat terletak pada pemberdayaan UKM desa. Hal ini dikarenakan UKM desa dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam perkembangan perekonomian desa, sehingga menjadi salah satu dasar yang memiliki peran krusial terhadap perekonomian desa di Indonesia (Darwin, 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke 26 desa di Kecamatan Natar untuk tahun anggaran 2023 sebesar 3% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 6%. Dengan meningkatnya anggaran dana desa ini diharapkan bahwa desa bisa menjadi mandiri dan sejahtera dengan bantuan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah, supaya mencapai tujuan ini aparatur desa dan masyarakat harus bekerja sama untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi, maka aparatur desa dan masyarakat harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya serta harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, penyajian, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Stewardship (*stewardship theory*)

Grand teori yang melandasi penelitian ini adalah teori stewardship (*stewardship theory*) yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991, teori ini menggambarkan keadaan dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan pribadi, tetapi lebih fokus pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut didasarkan pada kemampuan untuk selalu bekerja sama dalam organisasi yang memungkinkan mereka untuk terus melayani. Selanjutnya, pelayanan yang telah diberikan akan menghasilkan kepuasan dan kesuksesan bagi organisasi (Rizal & Hermanto, 2019). Teori stewardship dapat diterapkan untuk penelitian akuntansi organisasi sektor publik, seperti pemerintahan dan organisasi non-profit lainnya.

Implikasi teori stewardship pada penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa masyarakat desa sebagai principal yang mempercayakan eksistensi dan pemerintah desa sebagai steward untuk mengelola dana desa, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa. Selain itu, pertanggung-jawaban dana desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan standar laporan keuangan yang relevan, kredibel, mudah

dipahami dan dapat dibandingkan. Untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut aparatur desa harus transparan dan kompeten dalam mengelola dana desa.

2. Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip pemerintahan yang baik dan bergantung pada arus informasi yang bebas maksudnya seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi harus tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan serta informasi harus memadai untuk dipahami dan dipantau (Hotimah, 2021). Selain itu, transparansi dimaksudkan untuk menyediakan layanan publik yang memadai, terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya.

3. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang didukung oleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut (Rasman, 2018) dan aparatur desa merupakan orang yang bekerja dilingkungan pemerintah desa. Jadi pada dasarnya kompetensi aparatur desa sangat diperlukan dalam ruang lingkup pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan dengan menyajikan dan melaporkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan kepada masyarakat (Martini et al., 2019). Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Sari & Zefri, 2019). Oleh sebab itu, adanya prinsip akuntabilitas dalam pemerintah desa sangatlah penting karena dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana desa.

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian tindakan untuk mengatur keuangan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah, dimulai dari pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban demi mencapai tujuan yang sama (Masruhin & Kaukab, 2019). Pengelolaan dana desa yang baik dan efektif dapat meningkatkan pembangunan desa, mendukung kesejahteraan masyarakat dan dapat memperkuat perekonomian ditingkat desa.

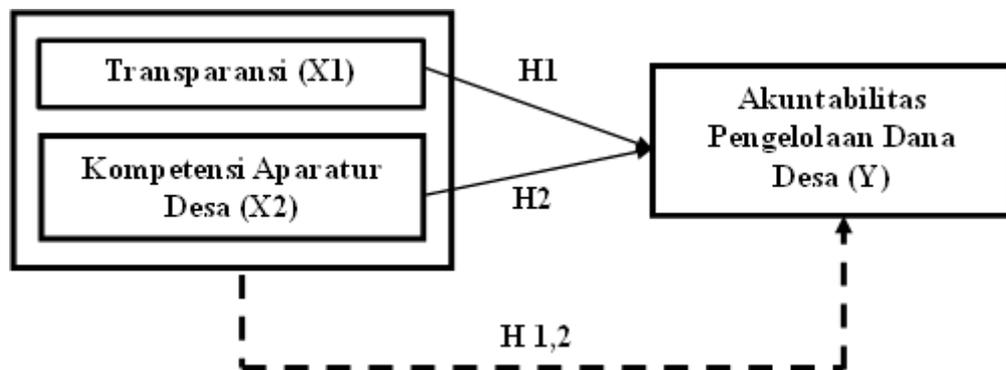
METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mencakup analisis menyeluruh dari laporan penelitian yang berkaitan dengan suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan memberikan penjelasan tentang variabel-variabel masalah dan unit-unit antara fenomena yang diteliti (Riyanto & Hatmawan, 2020).

2. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan model *konseptual* tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti (Rohita, 2021).



Sumber: *Data Diolah Penulis, 2024*

Keterangan :

-→ : Menunjukkan pengaruh secara simultan variabel bebas Transparansi (X1) dan Kompetensi Aparatur Desa (X2) terhadap variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).
- : Menunjukkan pengaruh secara parsial variabel bebas Transparansi (X1) dan Kompetensi Aparatur Desa (X2) terhadap variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 26 desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari -April 2024.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 26 desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan

metode sampling jenuh yang termasuk ke dalam kelompok *Non-Probability Sampling*. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui jumlah aparatur desa yang terkait dalam pengelolaan dana desa di 26 desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 130 orang, maka semua anggota populasi dijadikan sampel.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan Sumber data responden merupakan orang yang merespon atau menjawab pernyataan, baik tertulis maupun lisan kepada setiap responden melalui kuesioner dengan narasumber Aparatur Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan kuesioner/angket (Sugiyono, 2018).

7. Alat Analisis

Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer yaitu program IMB SPSS 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Adapun hasil analisis data adalah sebagai berikut:

a. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r _{hitung}		r _{tabel}		Keterangan
		N=30	N=130	N=30	N=130	
Transparansi (X1)	Item 1	0,636	0,710	0,361	0,172	Valid
	Item 2	0,616	0,637	0,361	0,172	Valid
	Item 3	0,614	0,745	0,361	0,172	Valid
	Item 4	0,633	0,764	0,361	0,172	Valid
	Item 5	0,618	0,710	0,361	0,172	Valid
	Item 6	0,621	0,749	0,361	0,172	Valid
	Item 7	0,617	0,585	0,361	0,172	Valid
	Item 8	0,643	0,574	0,361	0,172	Valid
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	Item 1	0,648	0,722	0,361	0,172	Valid
	Item 2	0,664	0,711	0,361	0,172	Valid
	Item 3	0,660	0,704	0,361	0,172	Valid
	Item 4	0,642	0,730	0,361	0,172	Valid
	Item 5	0,607	0,582	0,361	0,172	Valid
	Item 6	0,669	0,797	0,361	0,172	Valid
	Item 7	0,674	0,634	0,361	0,172	Valid
	Item 8	0,643	0,690	0,361	0,172	Valid
	Item 1	0,638	0,626	0,361	0,172	Valid
	Item 2	0,646	0,800	0,361	0,172	Valid

Variabel	Indikator	r _{hitung}		r _{tabel}		Keterangan
		N=30	N=130	N=30	N=130	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Item 3	0,664	0,679	0,361	0,172	Valid
	Item 4	0,605	0,746	0,361	0,172	Valid
	Item 5	0,646	0,697	0,361	0,172	Valid
	Item 6	0,624	0,718	0,361	0,172	Valid
	Item 7	0,696	0,755	0,361	0,172	Valid
	Item 8	0,642	0,725	0,361	0,172	Valid

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai r_{hitung} seluruh indikator pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} artinya seluruh pernyataan pada indikator variabel Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	r _{hitung}		Cronbach's alpha	Keterangan
		N=30	N=130		
1	Transparansi (X1)	0,771	0,837	0,60	Reliable
2	Kompetensi Aparatur Desa (X2)	0,799	0,848	0,60	Reliable
3	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,798	0,865	0,60	Reliable

Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa hasil uji reliabilitas pada nilai *cronbach's alpha* dalam setiap variabel menunjukkan angka > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dinyatakan lolos uji reliabilitas atau *reliable*.

c. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.01302921
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.041
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan hasil dari uji test normalitas Kolmogorov-Smirnov terlihat bahwa variabel residual dalam penelitian ini mempunyai nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ dengan kata lain data tabulasi kuisisioner berdistribusi normal.

d. Hasil Uji Multikolinieritas

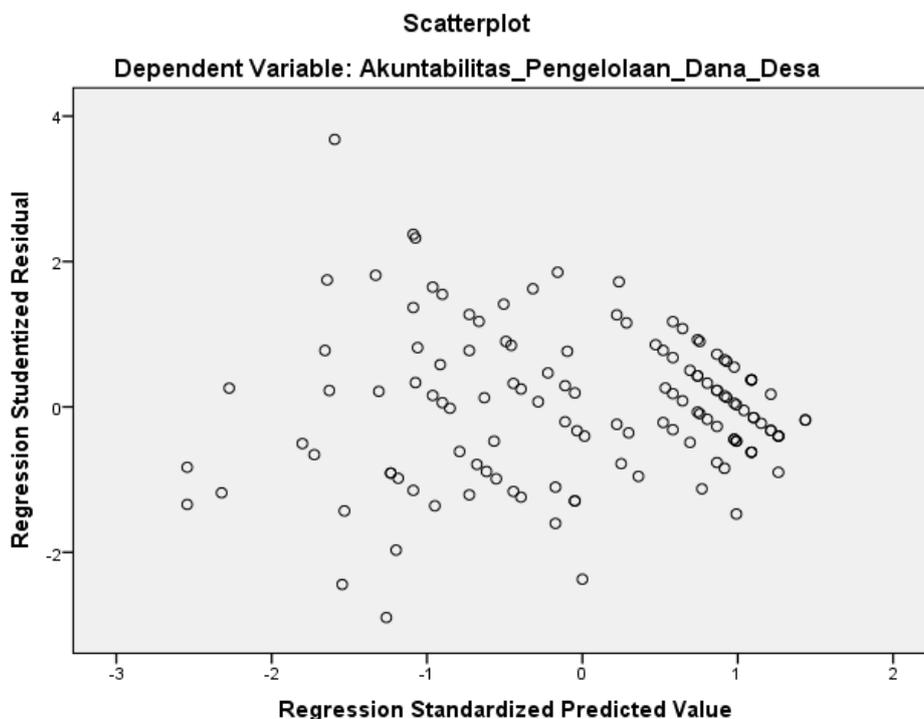
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.969	1.902		2.087	.039		
	Transparansi	.355	.066	.326	5.349	.000	.602	1.662
	Kompetensi_Aparatur_Desa	.555	.056	.602	9.894	.000	.602	1.662

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Pengelolaan_Dana_Desa

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan hasil uji multikolinieritas terlihat bahwa nilai tolerance yang diperoleh untuk semua variabel bebas $> 0,10$ sehingga dapat diartikan tidak terjadi gejala multikolinieritas dan nilai VIF yang diperoleh untuk semua variabel bebas $< 10,00$ sehingga dapat diartikan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

e. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan hasil Uji Heteroskedastisitas grafik *Scatterplot* yang disajikan menunjukkan bahwa titik–titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

f. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.847 ^a	.717	.712	2.029	1.784
a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Aparatur_Desa, Transparansi					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas_Pengelolaan_Dana_Desa					

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi tersebut dapat dilihat bahwa (dU) 1,744 < 1,784 (d) < 2,256 (4-du) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data ini.

g. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.969	1.902		2.087	.039		
	Transparansi	.355	.066	.326	5.349	.000	.602	1.662
	Kompetensi_Aparatur_Desa	.555	.056	.602	9.894	.000	.602	1.662
a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Pengelolaan_Dana_Desa								

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel tersebut maka persamaan hasil regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai Konstanta (α) dalam penelitian ini sebesar 3.969 yang artinya, apabila variabel independen Transparansi (X1) dan Kompetensi Aparatur Desa (X2) memiliki nilai konstan pada angka 0, maka nilai dari variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dianalogikan sebesar 3,969.
- b. Nilai $b_1 = 0,355$ yang artinya, apabila variabel independen Transparansi (X1) terjadi kenaikan sebesar satu (satuan), maka variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) akan terjadi kenaikan sebesar 0,355.

- c. Nilai $b_2 = 0,555$ yang artinya, apabila variabel independen Kompetensi Aparatur Desa (X_2) terjadi kenaikan sebesar satu (satuan), maka variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) akan terjadi kenaikan sebesar 0,555.
- d. Sehingga diperoleh persamaan regresi $Y = 3,969 + 0,355 X_1 + 0,555 X_2 + e$

h. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1322.332	2	661.166	160.629	.000 ^b
	Residual	522.745	127	4.116		
	Total	1845.077	129			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Pengelolaan_Dana_Desa
 b. Predictors: (Constant), Kompetensi_Aparatur_Desa, Transparansi

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 160,629 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,60. Karena nilai $F_{hitung} 160,629 > F_{tabel} 2,60$ dan nilai $sig 0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen Transparansi (X_1) dan Kompetensi Aparatur Desa (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

i. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a								
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.969	1.902		2.087	.039		
	Transparansi	.355	.066	.326	5.349	.000	.602	1.662
	Kompetensi_Aparatur_Desa	.555	.056	.602	9.894	.000	.602	1.662

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Pengelolaan_Dana_Desa

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi (X_1) dilihat dari nilai $T_{hitung} 5,349 > T_{tabel} 1,656$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel Transparansi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengeolaan Dana Desa. Maka kesimpulannya H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Kompetensi Aparatur Desa (X_2) dilihat dari nilai $T_{hitung} 9,894 > T_{tabel} 1,656$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel Kompetensi Aparatur Desa secara

parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Maka kesimpulannya H_0 ditolak dan H_a diterima.

j. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.847 ^a	.717	.712	2.029	1.784
a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Aparatur_Desa, Transparansi					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas_Pengelolaan_Dana_Desa					

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel tersebut hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) menjelaskan bahwa besarnya nilai yang diperoleh *Adjusted R-Square* sebesar 0,712 jika diubah ke persentase menjadi 71,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Transparansi (X_1) dan Kompetensi Aparatur Desa (X_2) berpengaruh sebesar 71,2% terhadap variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) sedangkan sisanya 28,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Dalam rangka untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh Transparansi (X_1) dan Kompetensi Aparatur Desa (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), maka peneliti telah melakukan penyebaran kuesioner kepada 130 responden aparatur desa. Penyebaran kuesioner tersebut dilakukan untuk menjawab topik permasalahan yang sedang diteliti dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, sehingga hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengajuan hipotesis pertama (H_1) yang dilakukan pada penelitian ini yaitu diduga Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis dari Uji F menjelaskan bahwa nilai F_{hitung} 160,629 > F_{tabel} 2,60 dan nilai *sig* 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengajuan hipotesis kedua (H_2) yang dilakukan pada penelitian ini yaitu diduga Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis dari uji T menjelaskan bahwa nilai $T_{hitung} 5,349 > T_{tabel} 1,656$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka kesimpulannya H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Transparansi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengajuan hipotesis ketiga (H_3) yang dilakukan pada penelitian ini yaitu diduga Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis dari uji T menjelaskan bahwa nilai $T_{hitung} 9,894 > T_{tabel} 1,656$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka kesimpulannya H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Transparansi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilya, K. R., & Fitria Astri. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Darwin, W. (2024). Pendampingan Pencatatan Akuntansi Sederhana pada Pemilik UKM Kerupuk Singkong di Desa Sewojajar. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(1).
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209.
- Hotimah, H. (2021). Transparansi dan akuntabilitas akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes). *Jurnal Akuntansi*, 9, 119–219.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, & S., Zulkifli, Z. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi*.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Rasman. (2018). Kompetensi Aparatur Desa Di Wilayah Kecamatan Budong- Budong Kabupaten Mamuju Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1–14.
- Riski, R. A., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi*.
- Rizal, N. A. A., & Hermanto, S. B. (2019). The role of organizational commitment mediates the effect of leadership style and competence on village government accountability. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 2–16.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–311.